

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Konsep Strategi

###### a. Pengertian Strategi

Istilah strategi muncul dari bahasa Yunani, yakni dari kata “stratos” yang memiliki arti tentara dan “again” yang memiliki arti memimpin. Maka strategi diartikan sebagai sebutan memimpin tentara. Terdapat pendapat mengenai strategi, yaitu menurut Hamel dan Prahalad yang mengartikan strategi merupakan tindakan yang bersifat selalu meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan dengan pandangan tentang apa yang diharapkan oleh seseorang dimasa depan. Strategi pada dasarnya mengarah pada sebuah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi memiliki susunan atau langkah-langkah sebuah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Kesimpulannya, strategi merupakan suatu cara yang dirancang yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi politik ini digunakan untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik untuk menarik simpati masyarakat umum dalam mendukung maupun ikut dalam kegiatan partai politik dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditentukan oleh partai politik tersebut. pernyataan diatas sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Hamel dan Prahalad.<sup>1</sup>

Dalam arti luas strategi merupakan cara untuk mendapatkan kemenangan ataupun pencapaian tujuan. Strategi juga sebagai proses pendekatan secara keseluruhan terhadap gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam waktu tertentu.

###### b. Jenis-jenis Strategi

Menurut Peter Schroder, strategi dibagi menjadi beberapa jenis dengan acuan pola dasar dan pilihan yang tepat,<sup>2</sup> yaitu :

---

<sup>1</sup> Trilke Tulung Jenifer Pesak, Daysi Posumah, “Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019” (2019).

<sup>2</sup> Trilke Tulung Jenifer Pesak, Daysi Posumah, “Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019” (2019).

### 1. Strategi Defensif

Strategi defensif muncul apabila suatu partai atau dari koalisi partai yang merupakan gabungan dari banyak partai ingin mempertahankan pasar. Strategi defensif ini muncul apabila suatu pasar yang tidak dipertahankan dan ditutup oleh suatu partai nantinya akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Dalam hal ini, strategi mempertahankan pasar harus dilakukan oleh partai dengan mempertahankan pemilih tetap dan memperkuat pemahaman pemilih pada situasi yang berlangsung. Partai-partai yang ingin mempertahankan pasarnya, mereka akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Partai yang menerapkan strategi ini melakukannya dengan menjalankan suatu pemeliharaan secara insentif perbidangnya dan menawarkan insentif kepada para kader-kader partainya. Partai yang menggunakan strategi ini kebanyakan partai yang sudah lama berdiri dan telah banyak mempunyai simpatisan diberbagai wilayah.

### 2. Strategi Ofensif

Strategi ini digunakan apabila partai ingin meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Strategi ini fokus untuk memperluas pasar dan menembus pasar. Dalam hal ini, sebuah partai harus memiliki nilai yang positif untuk dipandang masyarakat dan digunakan pada kampanye partai politik tersebut. Hal ini yang akan membuat keberhasilan partai dalam menggunakan strategi ofensif.

Strategi perluasan pasar, dilakukan oleh partai dengan penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan partai lain. Perluasan pasar ini bisa dicapai melalui isu dan agenda kampanye yang kreatif dan bermutu. Hal yang perlu diperhatikan juga penawaran keuntungan yang nantinya akan diterima oleh masyarakat dari partai ini. Sedangkan, Strategi menembus pasar adalah strategi penggalan potensi yang telah ada yang dioptimalkan. Hal ini menyangkut program-program yang dimiliki partai dilakukan lebih baik dan ditingkatkan terhadap program individu kader partai untuk memperbesar

tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Mayoritas partai yang menggunakan strategi ofensif merupakan partai baru yang hanya mempunyai simpatisan yang sedikit diseluruh daerah. Partai ini harus mengetahui potensi-potensi keunggulan partainya dan kadernya. Keunggulan potensi yang nantinya dapat digunakan pada kampanye partai untuk menambah pemilih partai.

### 3. Strategi Pencitraan

Strategi pencitraan ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan cetak. Media elektronik yang digunakan yaitu seperti televisi dan media sosial (facebook, twitter, instagram,dll). Selain itu juga menggunakan media cetak untuk membangun pencitraan sebuah partai. Strategi ini biasanya digunakan untuk membangun pola pikir masyarakat agar memilih partai ataupun calon tertentu. Strategi ini cocok untuk partai baru yang mana dengan untuk dapat menambah pemilihnya.

### 4. Strategi Ketokohan dan Kelembagaan

Strategi ketokohan ini dilakukan dengan memanfaatkan dari sebuah karakter tokoh pada tokoh partai tersebut. strategi ini dapat menarik masyarakat hanya dengan melihat tokoh yang ikut dalam partai tersebut. Sedangkan, strategi kelembagaan dilakukan dengan memanfaatkan ketokohan pada seseorang yang berada pada suatu lembaga dengan alasan dapat mempermudah urusan pada lembaga tersebut.

## 2. Partai Politik

### a. Pengertian Partai Politik

Dilihat secara terinologi, istilah “partai” dari kata part memiliki arti suatu bagian. Terdapat juga dalam bahasa perancis yang disebut *partager* yang artinya membagi-bagi. Terdapat juga dalam bahasa Inggris adalah *partaking* yang memiliki arti mengadakan kemitraan atau partisipasi.<sup>3</sup> Didalam buku *modern political parties*, sigmund neuman, mendefinisikan partai politik sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Winardi Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).

<sup>4</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*.

Partai politik pada umumnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk dapat memperoleh kekuasaan dalam politik dan untuk dapat memiliki kedudukan politik dengan cara konstitusional yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik di Indonesia menjadi sebuah pilar demokrasi yang mana nantinya mereka harus dapat menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita yang ideologis dan masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya untuk mewujudkan tujuan dalam bernegara yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi dasar dalam bernegara. Kata partai yang diambil dari dasar al-Qur'an dengan sebutan "*hizb*" secara harfiah yang memiliki arti;<sup>5</sup> **pertama**, partai merupakan organisasi yang memiliki ide dan aktivitas yang sama; **kedua**, organisasi yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; **ketiga**, terdapat kader yang ikut dalam berpartisipasi. Dari pengertian kata tersebut, partai atau *hizb* merupakan organisasi masyarakat yang telah bersatu karena memiliki arah dan tujuan yang sama.<sup>6</sup> Kata *hizb* banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an salah satunya yaitu;

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: "barang siapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka itu adalah dari Partai Allah yang pasti akan mendapat kemenangan."<sup>7</sup> (QS. Surat Al-Maidah ayat 56)

Para pakar-pakar siyasah sering menyebutkan partai politik dalam persoalan yang ada pada buku-bukunya dengan kata *hizb* yang terdapat dalam al-Qur'an. Para pakar-pakar siyasahitu juga menyimpkan tentang *hizb* yang merupakan ekuivalen untuk istilah dari partai dimasa modern yang merujuk pada firman-firman Allah yang terdapat pada al-Qur'an.

---

<sup>5</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam," *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (n.d.): 487-497.

<sup>6</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam," *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (n.d.): 487-497.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, (QS. Surat Al-Maidah Ayat 56 ), n.d.

**b. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai politik dibagi menjadi empat yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sebagai pengatur konflik.<sup>8</sup>

**1) Sarana komunikasi politik**

Partai politik pada fungsinya ini, memiliki tugas untuk menyalurkan ragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat sehingga dapat meminimalisir kesimpangsiuran pendapat dan aspirasi masyarakat. partai politik juga berfungsi untuk membicarakan dan menyebarluaskan berbagai rencana dan kebijakan dari pemerintah. Partai politik pada fungsinya ini dianggap sebagai alat penghubung masyarakat dengan pemerintah.

**2) Sarana sosialisasi politik**

Pada konteks usaha memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, partai politik harus memiliki banyak dari massa untuk mendukungnya. Dengan hal ini partai politik memiliki strategi untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dengan menanamkan solidaritas terhadap masyarakat, partai politik ini telah melakukan sosialisasi. Partai politik juga mengajarkan anggota-anggotanya agar bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai warga negara. Sosialisasi politik dapat diselenggarakan dengan bentuk seperti pendidikan politik, ceramah, kursus kader, kursus penataran dan lain sebagainya.

**3) Sarana rekrutmen politik**

Sarana rekrutmen politik ini berkaitan dengan masalah-masalah dari seleksi kepemimpinan. Partai politik juga memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki bakat untuk aktif kedalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai politik. Partai politik juga menarik golongan kaum muda yang dapat dijadikan sebagai kader untuk masa yang akan mendatang untuk menggantikan pimpinan-pimpinan lama.

**4) Sarana pengatur konflik**

Fungsi ini merupakan implementasi dari partai politik sebagai pengatur terjadinya banyak konflik yang ada pada suasana demokrasi yang dikarenakan adanya persaingan dan perbedaan pendapat. Partai politik juga akan berusaha untuk mengatasi saat terjadinya konflik. Tapi pada kenyataannya, informasi yang disebarluaskan justru menimbulkan

---

<sup>8</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*.

kegelisahan dan mengakibatkan perpecahan masyarakat yang dilatarbelakangi dengan kepentingan nasional akan tetapi hanya mementingkan kepentingan partai dan tidak menyelesaikan konflik justru mempertajam konflik.

### c. **Tipologi Partai Politik**

Terdapat model partai politik yang telah diklarifikasikan berdasarkan karakteristik utama, tujuan dan tugas-tugas partai politik. Pendapat Katz and Mair mengklasifikasikan karakteristik partai politik menjadi empat model yaitu elit, massa, kader dan *catch-all*.<sup>9</sup> *Pertama*, partai elit merupakan partai yang notabilitasnya dikuasai hanya beberapa orang saja dengan pengaruh yang besar pada jalannya organisasi partai. Partai elit dapat dilihat dari bagaimana partai itu mengambil sebuah kebijakan misalnya dalam proses menentukan kandidat dalam pemilihan umum, sikap-sikap atau dengan program-program dan kebijakan pemerintah yang diputuskan dengan cara tertutup. Karena faktor itu, maka dalam partai elit kompetisi didalam partai tersebut sangat terbatas.

*Kedua*, partai massa adalah partai yang menjadi tempat dari seluruh golongan masyarakat. partai model ini tidak condong pada ideologi tertentu karena pada dasar sifat partainya memiliki keterbukaan dan lebih fleksibel kepada seluruh anggotanya dibandingkan dengan partai lainnya. *Ketiga*, partai kader yaitu partai yang memiliki standarisasi yang ketat sehingga tidak sembarangan golongan masyarakat dengan mudah untuk masuk dalam partai ini. Partai ini memiliki tujuan tersendiri dari standarisasi kader yaitu agar dapat menjaga kemurnian dari tujuan dasar perjuangan partai. *Keempat*, partai *catch-all*, partai ini merupakan partai yang tidak mementingkan ideologi, aturan kerja dari organisasi, standarisasi partai, dan tujuan perjuangan yang jelas. Dinamakan partai *catch-all* karena partai ini merangkap seluruh ideologi yang lebih mementingkan dari selera masyarakat agar bisa memenangkan pemilihan umum. Ramlan Surbakti mengklasifikasikan model-model dari partai politik yang didasari oleh tipologi partai politik. Pendapatnya mengemukakan tipologi partai menjadi tiga yaitu;

- 1) Asas dan orientasi, partai politik dengan dasar asas dan orientasinya dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu

---

<sup>9</sup> andra Remon, "Rekrutmen Politik (Studi Tentang Pola Rekrutmen PDI Perjuangan Dalam Pencalonan Anton Charliyan Sebagai Calon Wakil Gubernur Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018)," 2019.

partai pragmatis, partai doktriner, dan partai kepentingan. Partai politik pragmatis merupakan partai yang tidak terikat dengan sebuah doktrin ideologi tertentu. Jadi setiap perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan dapat mengubah program, kegiatan dan tampilan partai tersebut. Partai politik doktriner yaitu partai politik yang merupakan kebalikan dari partai politik pragmatis. Partai politik ini memiliki program dan kegiatan yang konkret dengan perumusan dasar ideologi tertentu. Yang terakhir adalah partai politik kepentingan yang merupakan sebuah partai yang dibentuk dan dikelola dengan dasar kepentingan-kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis dan lingkungan hidup.

- 2) Komposisi dan fungsi anggota, partai politik dengan dasar komposisi dan fungsi anggotanya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa merupakan partai yang banyak mengandalkan jumlah atau kuantitas anggota dengan strategi mobilisasi massa yang banyak untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Untuk partai kader merupakan partai yang banyak mengandalkan dengan ukuran kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan anggota yang menjadi sumber utama partai.
- 3) Basis sosial dan tujuan, partai politik dengan dasar basis sosial dan tujuannya, diklasifikasikan menjadi empat tipe. Yang, *pertama* yaitu partai politik yang didalamnya berisi anggota dari golongan-golongan sosial masyarakat seperti masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah dan lain-lain. Yang *kedua*, partai politik berdasarkan kepentingan yaitu partai yang didalamnya berisi dari kelompok kepentingan seperti buruh, petani, atau pengusaha. Yang *ketiga* partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama seperti anggotanya dari basis Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Yang *keempat*, partai politik yang muncul dari budaya tertentu seperti dari suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

### 3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik. Rekrutmen ini meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang agar dapat melaksanakan sebuah peranan didalam pemerintahan. Maka dari itu sebuah partai sangat membutuhkan kader-kader yang baik dalam pelaksanaannya untuk

mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Dengan memiliki seorang kader-kader dengan kualitas yang baik maka, partai memiliki banyak peluang dalam pemenangan pemilu dan juga dapat mengajukan calon-calonnya untuk ikut dalam kepemimpinan lokal dan nasional.<sup>10</sup>

Almod dan Powell mempunyai pendapat adanya dua sifat dalam proses rekrutmen politik. Sifat rekrutmen ini juga bisa didefinisikan sebagai pola rekrutmen oleh partai politik. Sifat rekrutmen politik yaitu;<sup>11</sup>

- 1) Rekrutmen politik terbuka, yaitu mekanisme sebuah pemilihan penentuan kandidat yang dilakukan dengan cara demokratis dengan melibatkan golongan internal partai dengan mekanisme terbuka. Pemilihan ini lebih condong mengedepankan dari kesamaan hak dan kewajiban yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dan konstitusi partai.
- 2) Rekrutmen politik tertutup, yaitu rekrutmen dengan metode pemilihan kandidat dari partai politik yang hanya ditentukan oleh seorang elit politik atau penguasa dalam dunia partai politik tersebut. Rekrutmen politik tertutup ini lebih banyak dianggap sebagai pemilihan yang tidak demokratis karena prosesnya hanya melibatkan beberapa orang dan tidak melibatkan seluruh golongan yang ada pada partai politik tersebut.

Untuk menentukan kandidat, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan partai politik dalam menentukan kandidat dari partai politiknya yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan politik. Setiap partai politik mempunyai tahapan-tahapan tersendiri yang bergantung pada aturan dari konstitusi partai tersebut. menurut seorang yang bernama Pippa Norris mengemukakan ada tiga tahapan yang bisa dilakukan oleh partai politik agar dapat menentukan kandidatnya.<sup>12</sup> Tahapannya yaitu;

- 1) *Sertifikasi*, yaitu tahapan yang kaitanya dengan persyaratan-persyaratan yang formal yang didapat dari Undang-Undang pemilu maupun dari konstitusi partai politik. Contohnya dalam persyaratan formal dalam Undang-Undang pemilu seperti persyaratan minimum usia, tidak pernah terikat dalam kasus-

---

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

<sup>11</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>12</sup> Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik* (London: SAGE Publications Ltd, 2006).



kasus kriminal, batas minimum pendidikan, status sebagai warga negara dan lain-lain. Dalam konsitusi partai biasanya seperti batas minimal seorang kandidat harus menjadi anggota partai dalam beberapa tahun atau dekade pemilihan. Selain persyaratan formal, juga terdapat persyaratan yang informal yaitu tentang keterkaitan norma-norma masyarakat dan budaya-budaya disuatu negara.

- 2) *Nominasi*, yaitu tahapan yang mana calon kandidat telah memenuhi syarat. Proses nominasi kandidat ini sepenuhnya diatur oleh konstitusi atau peraturan partai. Nominasi ini berkaitan dengan pola kekuasaan didalam tubuh partai. Selanjutnya nominasi ditentukan oleh seorang pimpinan partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi).
- 3) *Seleksi*, yaitu proses yang dilakukan setelah semua peserta memenuhi syarat atau lolos dalam nominasi yang dilakukan oleh partai. Metode seleksi ini biasanya dilakukan dengan cara voting atau dengan penunjukan secara langsung. Sistem voting dilakukan dengan bertujuan untuk lebih transparansi dan demokratisasi internal partai agar semua anggotanya dapat merepresentasikan hak dan pendapatnya. Namun, sistem penunjukan langsung sangat identik dengan partai yang bersifat sentralistik atau terpusat yang mana keputusan partai diambil hanya dengan pertimbangan dan fikiran dari beberapa elit partai tersebut.

Tak hanya tahapan yang dilalui sebuah partai politik, didalam rekrutmen politik juga ada syarat-syarat yang harus dimiliki seorang kandidat. Syarat itu salah satunya sangat dibutuhkan buat mereka yang akan mengisi jabatan-jabatan yang terdapat di pemerintahan. Syarat-syarat agar dipilih dan dicalonkan dalam sebuah jabatan eksekutif pemerintahan yaitu;<sup>13</sup>

- 1) Agar dapat dipilih dan dicalonkan partai dalam sebuah jabatan eksekutif pemerintahan, anggota harus dapat membuktikan kesetiaan, kemampuan, dan kedisiplinanya kepada partai dengan tujuan berjalan bersama partai tersebut.
- 2) Syarat syarat anggota partai yang dipilih dan dicalonkan dalam jabatan eksekutif pemerintahan yaitu;

---

<sup>13</sup> Warsito Ellwein, *Konsolidasi Demokrasi: Komplikasi Hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin, Dan Pertemuan Nasional Forum Politik* (Jakarta, 2006). h. 70-71

- a) Anggota partai yang akan mencalonkan diri atau dipilih menjadi calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dari partai yaitu anggota partai yang minimal telah ikut bergabung didalam partai selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dan minimal juga pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai pada tingkat daerah kabupaten dan dinyatakan lulus dalam kaderisasi partai. Anggota juga harus memiliki pengetahuan yang cukup pada bidang pemerintahan dan berperilaku tidak tercela yang berada di wilayah domisili kabupaten/kota daerahnya.
  - b) Anggota partai yang mencalonkan diri atau dipilih unntuk dicalonkan partai sebagai gubernur/wakil gubernur yaitu anggota yang telah ikut bergabung dalam partai tidak kurang dari 4 (empat) tahun sebagai anggota dan juga minimal pernah menjadi seorang pengurus partai tersebut atau sebagai alat partai tersebut pada tingkat provinsi yang telah dinyatakan lulus dalam kaderisasi partai. Anggota harus memiliki pengetahuan yang cukup pada bidang pemerintahan dan berperilaku tidak tercela yang berdomisili di wilayah daerah provinsi tersebut.
  - c) Anggota partai yang mencalonkan diri atau dipilih untuk dicalonkan partai menjadi presiden/wakil presiden adalah anggota yang telah bergabung dalam partai tidak kurang 5 (lima) tahun sebagai anggota dan minimal harus pernah menjadi pengurus partai atau sebagai alat kelengkapan partai pada tingkat provinsi yang telah dinyatakan lulus dalam kaderisasi partai. Anggota ini harus memiliki pengetahuan yang cukup pada bidang pemerintahan dan tidak berperilaku yang tercela.
- 3) Ketentuan lebih lanjut dalam tata cara pemilihan anggota agar dapat duduk dalam jabatan eksekutif pemerintahan ditetapkan melalui peraturan partai.

Berdasarkan pada syarat-syarat tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa peranan partai politik menjadi sangat penting karena dapat menghasilkan calon-calon pemimpin pemerintahan.maka dari itu proses rekrutmen politik sangat diperlukan oleh partai politik yang dapat menyelaraskan perjalanan partai politik untuk dapat memperoleh pemimpin-pemimpin yang nantinya mengisi dijabatan pemerintahan.

Dalam pengusungan dan pencalonan seseorang yang akan dijadikan sebagai kandidat partai politik harus mengikuti aturan main yang telah disusun dan dirancang oleh partai politik tersebut yang sejalan dengan aturan negara.

#### 4. Santri

##### a. Pengertian Santri

Meurut C. C Berg, kata santri muncul dari bahasa india yaitu shastri yang memiliki arti orang yang tahu terhadap buku-buku suci agama hindu atau seorang ahli kitab suci agama hindu. Terdapat pendapat lain yaitu dari A. H. John menyebutkan istilah kata santri muncul dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.<sup>14</sup> Nurcholish Madjid juga memiliki pandangan dua pendapat tentang asal usul kata santri. Pertama, ia mengatakan bahwa kata “Santri” berasal dari kata satri yang berasal dari bahasa Sansekerta yang mempunyai arti melek huruf. Menurut Nurcholish Madjid pendapat tersebut didasari atas kaum santri kelas literary bagi orang awa yang telah mendalami agama melauai kitab-kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Kedua, pendapatnya mengatakan bahwa kata santri sesungguhnya muncul dari bahasa Jawa yaitu dari kata “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti gurunya kemanapun guru itu tinggal.<sup>15</sup>

Santri merupakan sekelompok orang yang kental bersamaan dengan kehidupan seorang ulama. Santri yaitu siswa atau murid yang dididik menjadi pengikut dan penganut dari perjuangan seorang ulama dalam berdakwah. Santri merupakan julukan kehormatan bagi seseorang yang ikut oleh ulama. Julukan gelar santri bukan semata-mata karena sebagai murid/pelajar, namun gelar itu juga mewakili dari seseorang yang memiliki akhlak yang lebih baik dibandingkan dengan orang awam yang ada pada lingkungannya. Buktinya yaitu ketika seorang santri yang telah selesai belajar dari pesantren itu memiliki akhlak dan kepribadian yang lebih baik. Istilah santri dapat ditunjukkan oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu agama dipondok pesantren. Sebutan santri juga didasari dari seorang gurunya

---

<sup>14</sup> Dadan Muttaqien, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat) Oleh,” *JPI FIAI* V, no. IV (1999): 79–87.

<sup>15</sup> m. Turhan Yan Muhammad Nurul Huda, “Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan Muhammad Nurul Huda,” *Kajiam Moral dan Kewarganegaraan* 02, no. 03 (2015): 740–753.

yang disebut kyai. Para santri menuntut pendidikan ilmu agama kepada para kyai dan bertempat pada pondok pesantren.

#### **b. Bentuk Santri**

Santri merupakan para siswa yang mendalami pengetahuan ilmu agama di pesantren baik tinggal maupun pulang setelah selesai belajar. Zamakhsyari Dhofir membagi menjadi dua bentuk kelompok santri yang diamati dengan tradisi pesantren yaitu;<sup>16</sup>

- a. Santri mukmin, yaitu para santri yang telah menetap dipondok pesantren. Biasaya santri ini diberikan tanggungjawab untuk mengurus kepentingan-kepentingan pesantren. Jika santri lama tinggal dipesantren maka statusnya akan naik dan biasanya diberikan tugas-tugas oleh kyainya untuk mengajarkan kitab-kitan dasar kepada santri-santri yang lebih bawah tingkatannya.
- b. Santri kalong, yaitu para santri yang selalu pulang setelah selesai beajar atau kalau malam dirinya berada di pesantren kalau siang pulang.

### **5. Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih pada pemilu merupakan bentuk dari perilaku dalam berpolitik. Perilaku politik dan partisipasi politik menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam politik. Partisipasi politik dapat terwujud dalam macam-macam bentuknya. Wujud partisipasi politik yaitu kegiatan pemilihan dengan mencakup sebuah suara, adanya bentuk sumbangan-sumbangan untuk berkampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, dan pencarian dukungan untuk seorang calon atau segala tindakan yang memiliki tujuan agar dapat mempengaruhi hasil dari kegiatan pemilihan. Kristadi dalam karyanya mengatakan Perilaku pemilih juga sebagai keterikatan dari seseorang dalam memberikan sebuah suara kedalam proses pemilihan dengan berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dadan Muttaqien, "Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat) Oleh."

<sup>17</sup> Kristadi J, *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih Di Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 1987-1992, (Disertasi)* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994). h. 76

Perilaku pemilih pada dasarnya mempergunakan dari macam-macam pendekatan yang telah berkembang hingga saat ini yaitu:<sup>18</sup>

**a. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis ini awal munculnya dari Eropa yang pada kemudian hari berkembang di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu sosial Universitas Colombia (*Colombia's University Bureau of Applied Social Science*) yang dikenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini meneliti mengenai *voting* pada tahun 1948 dan 1952.<sup>19</sup> Karya itu mengungkapkan perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, yaitu sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Variabel dominan yang mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya yaitu agama, jenis kelamin, pendidikan, faktor geografis, budaya dan variabel sosial.<sup>20</sup>

**b. Pendekatan Psikologis**

Pendekatan psikologis ini pada awalnya digunakan oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Resreach Centre*) yang dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Beberapa hasil yang terkenal luas dari penelitian kelompok Michigan ini yaitu *The Voter's Decide (1954)* dan *The American Voter (1960)*.<sup>21</sup> Pendekatan psikologis muncul dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpuasan dari pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dinilai kurang untuk menjelaskan dengan cara metodologis dari kecenderungan-kecenderungan yang muncul dalam suatu masyarakat seperti sulitnya menentukan kriteria pengelompokan masyarakat dan ketidaktahuan dalam kelompok-kelompok pendukung dan pemilih partai politik.

---

<sup>18</sup> Kristadi J, Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih Di Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 1987-1992, (Disertasi) (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994). h. 76

<sup>19</sup> Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber Teori-Teori, Dan Metode* (Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung Fur Die Freiheit, 2008). h. 23-24

<sup>20</sup> Erna Febriani, "Analisis Perilaku Umum Memilih ( Voting Behavior ) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019" 4, no. 1 (2019): 1-18.

<sup>21</sup> Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber Teori-Teori, Dan Metode* (Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung Fur Die Freiheit, 2008). h. 37

Hal tersebut terjadi karena pendekatan sosiologis hanya menjelaskan sebuah kecenderungan kelompok masyarakat yang mendukung partai tertentu tanpa adanya pemastian pemilih. Faktor yang mempengaruhi pendekatan ini adalah keterikatan seseorang pada suatu partai politik, orientasi seseorang terhadap calon legislatif maupun eksekutif, orientasi seorang pemilih terhadap isu-isu politik.

**c. Pendekatan Rasional**

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Antony Downs dengan teori ekonomi dan demokrasi dari dirinya. Antony Downs merupakan orang yang konsekuen terhadap pengambilan jarak dari dasar-dasar penjelasan yang telah dicetuskan oleh mazhab Colombia (pendekatan sosiologis) dan mazhab Michigan (pendekatan psikologis). Menurut Antony Downs, pemilih yang rasional yaitu pemilih yang hanya menuruti kepentingannya sendiri dan akan senantiasa mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan orang lain atau bisa dibilang egois.<sup>22</sup> Alasan-alasan individu seseorang yang menjadikan mereka menjadi egois dilatarbelakangi oleh kesejahteraan material mereka dengan bertujuan ingin menambah pemasukan harta benda mereka. Perilaku pemilih ini akan memperlihatkan sisi dari seorang pemilih dalam memberikan pilihannya kepada kandidat atau partai tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menguntungkan untuk dirinya. Pemilih seperti ini umumnya mengabaikan konsep dari politik sebuah partai maupun kandidat dan lebih memperhitungkan keuntungan besar jika partai atau kandidat tersebut menduduki sebuah jabatan publik.

---

<sup>22</sup> Erna Febriani, "Analisis Perilaku Memilih ( Voting Behavior ) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019."

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini bertujuan agar mendapatkan bahan acuan serta perbandingan. Penelitian terdahulu ini juga berpengaruh agar tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penulis telah mencoba untuk menelaah terlebih dahulu dari sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku dan jurnal guna mendapatkan keperbaruan dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;



**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis Tahun dan Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Teori Yang Digunakan</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbandingan Dengan Penelitian Ini</b>
1.	Else Suhaimi, 2018 “Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	Untuk mengetahui pola dari rekrutmen politik dengan menggunakan dasar-dasar ideologi dari sebuah sistem tata negara Indonesia	Teori rekrutmen politik	Deskriptif kualitatif	Rekrutmen politik ideologis yang dilaksanakan oleh partai politik dengan mendasarkan aktivitas partainya pada ideologi tertentu. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, ideologi yang digunakan oleh partai politik antara lain ideologi agama (Islam) dan ideologi selain Islam seperti nasionalis dan sebagainya. Rekrutmen politik merupakan salah satu bentuk aktivitas	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan pembahasan tentang rekrutmen politik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus dengan pola rekrutmen politik dengan ideologi yang mendasar politik indonesia. sedangkan penelitian saya lebih fokus ke rekrutmen PSI



					politik. Rekrutmen politik ideologi melahirkan pola rekrutmen yang tersistematis dan terstruktur. Pola rekrutmen tersebut dapat dilihat dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan secara terus menerus, terkoordinir, terevaluasi dan berjenjang	dengan objek santri, namun penelitian ini membahas pada objek tatanan partai politik Indonesia. <sup>23</sup>
2.	Gemayel Paulus Aruan, Muradi, Neneng Yani Yuningsih 2022 Rekrutmen Politik Pada Tahapan	Untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai PSI dengan tahapan pencalonan anggota legislatif dapil jawa barat I	Teori rekrutmen politik	Deskriptif kualitatif	rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019 pada Partai Solidaritas Indonesia Dapil Jawa Barat I dengan kesimpulan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas permasalahan rekrutmen politik. Sedangkan perbedaan dengan

<sup>23</sup> Else Suhaimi, "Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia \*."

	Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I).	dengan faktor-faktor yang telah dihadapi.			pembahasan Pola rekrutmen politik dan Hasil pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I dapat dilihat dari hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I	penelitian saya yaitu penelitian ini membahas rekrutmen pencalegan pada pemilu 2019 pada dapil jawa barat I. sedangkan penelitian saya berisi tentang rekrutmen kandidat kader PSI pada kalangan santri. <sup>24</sup>
3.	Chelsy Yesicha 2018 “Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan Di Provinsi Riau	Unntuk mengetahui strategi marketing yang telah dilakukan oleh partai PSI yang difokuskan kepada	Teori rekrutmen politik	Deskriptif kualitatif	strategi marketing yang dilakukan partai politik dengan Image building yang digunakan dalam rekrutmen politisi perempuan PSI Riau, hadir dengan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pembahasan rekrutmen politik. Sedangkan perbedaan dengan

<sup>24</sup> Neneng Yani Yuningsih Gemayel Paulus Aruan, Muradi, “Rekrutmen Politik Pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 ( Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I )” 6 (2019): 47–59.

	(Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasional Demokrat)”. perekrutan politisi perempuan PSI Riau				mengutamakan keterbukaan dan keinovatifan yang memberikan peluang besar bagi politisi muda, bernilai ramah perempuan guna menggugah calon menjadi mata rantai penggerak perempuan Riau untuk ikut dalam berpolitik	penelitian saya yaitu penelitian ini tentang perekrutan pada politisi perempuan PSI Riau sedangkan penelitian saya tentang perekrutan pada politisi kalangan santri Rembang. <sup>25</sup>
4.	Nonong Asrina dan Ubaidullah 2019 “Sistem Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terhadap Kandidat Calon	Untuk mengetahui tentang sistem proses rekrutmen seorang caleg pada pemilu 2019 di DPW PSI Aceh dengan	Teori rekrutmen politik	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini berisi tentang, sistem proses rekrutmen caleg, DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Aceh menggunakan prosedur terbuka, artinya rekrutmen	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pada sistem rekrutmen politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

<sup>25</sup> Chelsy Yesicha, “Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Dan Partai Nasional Demokrat).”

	<p>Anggota Legislatif Menjelang Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: di DPW PSI Aceh)”.</p>	<p>sistem terbuka dan tertutup.</p>		<p>terbuka untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Setiap masyarakat berhak memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya, serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan.</p>	<p>saya yaitu penelitian ini berobyek pada pemilu 2019 di DPW PSI Aceh. Sedangkan penelitian saya berobyek pada pencalonan pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.<sup>26</sup></p>
--	---	-------------------------------------	--	---	---

---

<sup>26</sup> Ubaidullah Nonong Asrina, “Sistem Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terhadap Kandidat Calon Anggota Legislatif Menjelang Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: Di DPW PSI Aceh)” 4, no. 1 (2019): 1–12.

5.	Andrei I. Pandelaki, Burhan Niode, Alfon Kimbal 2020 Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solisaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.	Untuk mengetahui rekrutmen bakal calon legislatif dengan image dari PSI Sulawesi Utara.	Teori rekrutmen politik	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini berisi tentang proses rekrutmen politik PSI dalam merekrut bakal calon anggota legislatif pada wilayah Sulawesi Utara dengan tindakan dan image dengan menegedepankan prinsip PSI.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pada sistem rekrutmen politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menggunakan objek di Wilayah PSI Sulawesi Utara sedangkan penelitian saya pada Daerah Rembang. <sup>27</sup>
----	--	---	-------------------------	-----------------------	---	--

---

<sup>27</sup> Alfon Kimbal Andrei I. Pandelaki, Burhan Niode, “Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solisaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara” 2, no. 5 (2024): 1–8.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini muncul dari fenomena partai peserta dalam pemilu 2024. Salah satunya, Partai Solidaritas Indonesia. Partai PSI ini merupakan partai pemuda yang telah muncul di Indonesia. PSI DPD Rembang sendiri memiliki kader-kader dari kalangan masyarakat santri. Dengan ini pasti PSI memiliki strategi dalam sebuah rekrutmen kader-kadernya. Didalam strategi rekrutmen pasti harus juga memephatikan pola tahapan dan syarat yang dilakukan partai tersebut. Maka dari itu, penelitian ini diangkat dari ketertarikan fenomena tersebut dengan fokus pada suatu daerah pimpinan DPD PSI Rembang untuk mengetahui strateginya dalam merekrut kader dan kandidat Partai Solidaritas Indonesia pada kalangan santri, dengan berbagai faktor faktor yang mempengaruhi perekrutan tersebut.

Selain itu peneliti juga meneliti tentang permasalahan alasan ketertarikan kader kalangan santri yang ikut bergabung dalam PSI Rembang. Fokus tentang permasalahan alasan kader santri PSI Rembang di teliti dengan teori perilaku pemilih dalam ketertarikannya melalui beberapa pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan psikologis, sosiologis dan rasional. Pada permasalahan tersebut banyak alasan ketertarikan santri yang bisa dilihat dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh PSI Rembang nantinya dapat memunculkan banyak alasan santri yang tertarik dengan salah satu pendekatan itu untuk dapat digunakan dalam kegiatan rekrutmen kader santri dengan berkelanjutan. untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

